



# PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Salotungo No. ... Telp. (0484) 21619 Watansoppeng Kode Pos 90812

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 1688.a/KDS/I/2017

#### TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2016-2021

#### SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Strategis Tahun 2011-2015, dan dimulainya Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka Sekretariat Daerah kabupaten Soppeng perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

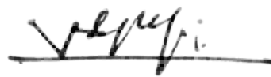
**KESATU** : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

- KETIGA** : Saat keputusan ini ditetapkan, maka keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1268/KDS/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. H. SUGIRMAN DJAROPI, MS**

Pangkat : Pembina Utama Madya

N i p : 19570715 198303 1 032

## LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 1688.a/KDS/I/2017

TANGGAL : 12 Januari 2017

**TENTANG**  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

**SKPD** : Sekretariat Daerah**TUGAS** : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

**FUNGSI** :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Sumber Data	Rumus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	Persentase Kedinasan yang terlayani dengan baik	Bagian Umum	Dokumen Kegiatan Pada Bagian Umum	$\frac{\text{Jumlah Kedinasan KDH \& WKDH yg terlayani dgn baik}}{\text{Jumlah Kedinasan KDH \& WKDH}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai kebutuhan	Bagian Organisasi & Tata Laksana	Dokumen Kegiatan Pada Bagian Organisasi & Tata Laksana	$\frac{\text{Persentase SKPD yang kelembagaannya sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang melaksanakan SPM	Bagian Organisasi & Tata Laksana	Dokumen Kegiatan Pada Bagian Organisasi & Tata Laksana	$\frac{\text{Jumlah SKPD Pelayanan Publik yg melaksanakan SPM}}{\text{Jumlah SKPD Pelayanan Publik}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Sumber Data	Rumus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4	Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio Regulasi dan kasus hukum yang terselesaikan	Bagian Hukum & Perundang-undangan	Dokumen Kegiatan pada Bagian Hukum & Perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Regulasi \& Kasus Hukum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Regulasi \& Kasus Hukum yang masuk}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Kegiatan pada Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	$\text{Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba sesuai data kepolisian}$	
6	Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah	Bagian Humas & Protokol	Dokumen Kegiatan pada Bagian Humas & Protokol	$\text{ada atau tidaknya sistem informasi pemerintah daerah}$	
7	Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Rasio Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/ seleksi yang selesai tepat waktu	Bagian Adm. Pembangunan	Dokumen Kegiatan pada Bagian Adm. Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah PBJ melalui pelelangan atau seleksi yg selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah PBJ melalui pelelangan atau seleksi}} \times 100\%$	
8	Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	Semua Bagian	Dokumen Kegiatan lingkup Sekretariat Daerah	$\frac{\text{Jumlah SKPD yg terkoordinasi sesuai tupoksi}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. H. SUGIRMAN DJAROPI, MS**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19570715 198303 1 032